



KHARTOUM -
SUDAN

17-22 JANUARI 2013

LAPORAN BADAN KERJASAMA ANTAR PARLEMEN
DELEGASI DPR RI KE THE 8TH SESSION
OF PARLIAMENTARY UNION OF OIC MEMBER STATES
(PUIC) CONFERENCES AND OTHER RELATED
MEETINGS



LAPORAN BADAN KERJASAMA ANTAR PARLEMEN
MENGENAI DELEGASI DPR RI KE
THE 8TH SESSION OF PUIC CONFERENCE
AND OTHER RELATED MEETINGS
KHARTOUM, SUDAN, 17-22 JANUARI 2013

I. PENDAHULUAN

Pada tanggal 17 sampai dengan 22 Januari 2013 Delegasi DPR RI telah menghadiri rangkaian *the 8th Session of Parliamentary Union of OIC Member States (PUIC) Conference and other related meetings* di Khartoum, Sudan. Konferensi ini dihadiri oleh 37 dari 52 negara anggota PUIC dan 8 *observers*.

Delegasi DPR RI terdiri dari:

- 1) KH. DR. Surahman Hidayat (Ketua BKSAP/FPKS/Komisi X) - Ketua Delegasi
- 2) DR. Nurhayati Ali Assegaf (Anggota BKSAP/FPD/Komisi I) - Anggota Delegasi
- 3) Ir. Atte Sugandi, MM. (Anggota BKSAP/ FPD/ Komisi VI) - Anggota Delegasi
- 4) Muhammad Baghowi (Ketua GKSB Sudan/FPD/Komisi VII) - Anggota Delegasi
- 5) Hj. Harbiah Salahuddin, M.Si. (Anggota BKSAP/ FPG/ Komisi X) - Anggota Delegasi
- 6) DR. Arif Budimanta, M.Sc. (Anggota BKSAP/ FPDIP/ Komisi III) - Anggota Delegasi
- 7) H. Mustofa Assegaf, M.Si. (Anggota BKSAP/FPPP/ Komisi XI) - Anggota Delegasi
- 8) Hj. Chusnunia Chalim, M.Si. (Anggota BKSAP/ FPKB/ Komisi IX) - Anggota Delegasi

Delegasi didampingi oleh unsur Kemenlu, KBRI Khartoum, Tenaga Ahli BKSAP dan Setjen DPR RI.

II. MISI DELEGASI

1. BKSAP menargetkan agar Indonesia dapat mengikuti seluruh pertemuan dengan baik;
2. Menyerahkan tongkat kepemimpinan Presidensi PUIC Conference kepada Ketua Parlemen Sudan sebagai Presiden PUIC Conference ke-8;
3. Memberi kontribusi Indonesia pada berbagai diskusi komite-komite di mana Indonesia menjadi anggota dan berkontribusi pada draf-draf resolusi yang diadopsi diadopsi pada Konferensi;
4. Menjalin *networking* dengan delegasi parlemen dan organisasi internasional yang hadir di sidang PUIC.

III. AGENDA PERSIDANGAN

Rangkaian The 8th Session of PUIC Conference telah membahas sejumlah agenda dan isu yang pembahasannya dilaksanakan melalui:

1. *29th Meeting of the PUIC Executive Committee;*
2. *2nd Meeting of the Standing Committee on Palestine Affairs;*
3. *1st Meeting of the Standing Specialized Committee on Political and Foreign Relations;*
4. *1st Meeting of the Standing Specialized Committee on Human Rights, Women, and Family Affairs;*

5. *1st Meeting of the Standing Specialized Committee on Cultural and Legal Affairs and Dialogue of Civilizations and Religions;*
6. *2nd Session of the Conference of Muslim Women Parliamentarians;*
7. *15th Session of PUIC General Committee;*
8. *8th Session of PUIC Conference.*

Delegasi DPR RI tidak mengikuti pertemuan *1st Meeting of the Standing Specialized Committee on Economic Affairs and Environment*, karena Indonesia bukan anggota dari Komite ini.

IV. POKOK-POKOK HASIL PERSIDANGAN

A. EXECUTIVE COMMITTEE

Pertemuan Executive Committee PUIC ke-29 dipimpin oleh Ketua Parlemen Sudan. Dari sepuluh mata agenda yang dibahas, isu tindak lanjut dokumen *Islamic Parliamentary Declaration* mendapatkan perhatian yang cukup mendalam dari anggota *Executive Committee*.

Dokumen yang diajukan oleh Uni Emirat Arab (UEA) tersebut pada prinsipnya menyepakati rencana pembentukan Parlemen Islam yang anggotanya merupakan perwakilan dari seluruh negara yang tergabung dalam PUIC.

Namun demikian, Indonesia, yang diwakili oleh Ketua BKSAP, **KH. Dr. Surahman Hidayat, MA.**, bersama dengan Turki dan Iran meminta agar negara-negara anggota diberikan waktu tambahan untuk mempelajari draft deklarasi ini, mengingat tidak semua negara anggota turut serta dalam pembahasan tingkat pakar. Disamping itu, ke-tiga negara menilai masih lemahnya rancangan mekanisme dan modalitas tindak lanjut bagi pelaksanaan rencana pembentukan Parlemen Islam tersebut. Di lain pihak, UEA didukung kelompok Afrika menuntut agar suatu keputusan segera diberlakukan mengingat pembahasan telah berlangsung selama 2 tahun.



Foto 1. Ketua BKSAP, KH. DR. Surahman Hidayat pada pertemuan Executive Committee PUIC

Pada akhirnya, Komite memutuskan untuk merujuk kembali dokumen tersebut kepada satu pertemuan pakar yang dijadwalkan akan berlangsung di Khartoum dalam satu bulan mendatang untuk menentukan penerimaan deklarasi dimaksud.

Hal lain yang diputuskan dalam Executive Committee termasuk persetujuan usulan untuk melakukan pertemuan para Sekretariat Jenderal Parlemen anggota PUIC di mana Turki akan menjadi tuan rumah pertemuan pertamanya. Dibahas pula isu kelompok minoritas serta perubahan tata cara pengajuan rancangan resolusi yang harus didaftarkan kembali oleh negara yang berkepentingan setiap tahunnya sehingga tidak otomatis sebagaimana sebelumnya. Executive Committee juga merencanakan untuk kembali mengunjungi Ramallah dan Gaza guna menegaskan kembali dukungan mereka terhadap perjuangan negara Palestina.

B. STANDING COMMITTEE ON PALESTINE AFFAIRS

Pada pertemuan komite ini, telah dibahas antara lain, mekanisme keanggotaan komite, di mana negara yang sejak awal menjadi anggota dari Komite ini akan menjadi anggota permanen. Sedangkan negara anggota lain yang akan ikut, harus menyampaikan permohonannya terlebih dahulu. Anggota Komite juga diusulkan untuk

tidak melebihi 20 negara.

Dalam intervensinya, Delegasi DPR RI yang diwakili oleh **KH. Dr. Surahman Hidayat** dan **H. Mustofa Assegaf, M.Si.** telah menekankan kembali komitmen Indonesia untuk tetap mendorong terciptanya negara Palestina yang berdaulat penuh. Indonesia juga mendorong rekonsiliasi kedua faksi di Palestina untuk memperkuat perjuangan Palestina dalam memperoleh keinginannya. Laporan Komite ini dapat dilihat pada **lampiran 1.**

C. STANDING SPECIALIZED COMMITTEE ON POLITICAL AFFAIRS AND FOREIGN RELATIONS

Dalam pertemuan the 1st Standing Specialized Committee on Political Affairs and Foreign Relations, Indonesia telah mengajukan 4 (empat) rancangan resolusi, yaitu dengan judul:

1. *Following up the steps taken to implement the PUIC resolution concerning the visit by a delegation of speakers of member parliaments to Gaza Strip*
2. *Promoting solidarity and unity among muslim states to confront increasing challenges and conspiracies which target the capabilities of the Islamic ummah*
3. *Position of Rohingya Muslims in Myanmar*
4. *Peoples' dynamism in the Middle East*

Ke-empat resolusi telah disepakati dengan tambahan masukan dari Sekretariat Jenderal PUIC dan delegasi lain. Secara keseluruhan, komite ini membahas 25 (dua puluh lima) draft resolusi yang mayoritas merupakan pengulangan dari pertemuan sebelumnya. Laporan Standing Committee ini dapat dilihat pada **lampiran 2.**



Foto 2. Delegasi DPR RI (kanan-kiri), KH. Dr. Surahman Hidayat, MA., Atte Sugandi, MM., dan Bapak Muhammad Baghowi pada Standing Specialized Committee on Political Affairs and Foreign Relations

Isu dukungan bagi Pemerintah Mali juga telah mendapat perhatian khusus dari komite ini dan PUIC sepakat untuk memperkuat dukungan kepada Pemerintah Mali dari serangan kelompok Islam radikal. PUIC meminta agar negara di kawasan dapat memainkan peran yang lebih besar dalam penanganan situasi di Mali.

D. STANDING SPECIALIZED COMMITTEE ON HUMAN RIGHTS, WOMEN AND FAMILY AFFAIRS

Pada pertemuan ini, 1 (satu) rancangan resolusi dengan judul *Enhancing the role of women in all development aspects in PUIC Member states* yang diajukan oleh Indonesia telah disepakati dengan amandemen terkait penguatan kapasitas bagi parlemen wanita di negara-negara di mana Muslim menjadi minoritas.



Foto 3. Delegasi DPR RI (kiri-kanan), Ibu Harbiah Salahuddin dan Ibu Chusnunia pada Standing Specialized Committee on Human Rights, Women and Family Affairs

Dalam kesempatan tersebut, Delri telah memberikan masukan implementatif terhadap 5 (lima) rancangan resolusi yang disepakati, termasuk bahaya polio sebagai salah satu penyakit endemik. Secara khusus, Deputi Sekjen PUIC, Ambassador Abu Aqla, menyampaikan apresiasinya kepada Dr. Nurhayati Ali Assegaf atas kontribusi dan komitmennya selama menjadi Ketua Conference of Muslim Women Parliamentarians dan sebagai pemrakarsa terselenggaranya Conference of Muslim Women Parliamentarians yang pertama di Palembang tahun 2012.

E. STANDING SPECIALIZED COMMITTEE ON CULTURAL AND LEGAL AFFAIRS AND DIALOGUE OF CIVILIZATIONS AND RELIGIONS

Delegasi DPR RI kembali berhasil memasukkan satu draft resolusi dengan judul *Establishing a legal framework for the protection of the rights of migrant workers and their families as well as taking care of their rights, especially of women*. Secara khusus, resolusi ini meminta seluruh anggota parlemen anggota PUIC agar bersama pemerintahnya menciptakan kerangka hukum yang kuat dalam melindungi tenaga kerja wanita. Hal ini juga merupakan tindak lanjut dari resolusi yang sebelumnya dihasilkan di

Palembang, Indonesia. Laporan komite ini dapat dilihat pada **lampiran 3**.



Foto 4. Delegasi DPR RI (kiri-kanan), Ibu Harbiah Salahuddin dan Ibu Chusnunia pada Standing Specialized Committee on Human Rights, Women and Family Affairs

F. CONFERENCE ON THE MUSLIM WOMEN PARLIAMENTARIANS

Pada pertemuan ini telah dibahas 14 (empat belas) mata agenda. Adapun hal-hal menonjol dari pertemuan komite ini adalah terkait perlindungan migran perempuan dan anak-anak di wilayah pensusukan atau konflik, pembuatan Rules of Procedure, serta permintaan untuk melaksanakan pertemuan anggota parlemen perempuan di setiap Konferensi PUIC.



Foto 5. Dr. Nurhayati Ali Assegaf dengan bersama dengan (kiri) Ketua Parlemen Sudan, Ketua Kaukus Perempuan Parlemen Sudan, Sekjen PUIC dan (kanan) anggota parlemen perempuan Burkina Faso pada sesi pembukaan the 2nd Conference of the Muslim Women Parliamentarians

Dalam kesempatan ini, selain menyampaikan pidato pada opening session dan melakukan pertemuan dengan Ketua Parlemen Sudan dan Ketua Parlemen UEA, **Dr. Nurhayati Ali Assegaf** juga terpilih sebagai Wakil Presiden dari Konferensi Parlemen Wanita Muslim ini bersama dengan Burkina Faso. Delegasi DPR RI yang diwakili oleh **Dra. Harbiah Salahuddin, M.Sc.** dan **Hj. Chusnunia, M.Si.** memberikan masukan pada draft Khartoum Declaration of Muslim Women Parliamentarians yang diajukan oleh Parlemen Sudan (dokumen final dapat dilihat pada **lampiran 4**).

G. CONSULTATION MEETING OF THE ASIAN GROUP

Pada pertemuan ini disepakati bahwa Indonesia menjadi anggota pada *Standing Specialized Committee on Political and Foreign Relations* dan *Standing Specialized Committee on Economic Affairs and Environment* sebagai wakil dari Grup Asia untuk periode 2012-2013. Sementara Indonesia sebagai Presiden PUIC terdahulu masih merupakan anggota dari PUIC Executive Committee.



Foto 6. KH. Dr. Surahman Hidayat pada Consultation Meeting of the Asian Group

H. GENERAL COMMITTEE

Dalam pertemuan ke-15 dari PUIC General Committee, telah disepakati Turki (sebagai wakil Grup Asia) dan Uganda (sebagai wakil Grup Afrika) sebagai wakil presiden konferensi ini. Telah dibahas dan disepakati pula anggaran tahun 2013 dari PUIC yang tidak mengalami kenaikan kontribusi. Pertemuan komite ini juga menetapkan kelompok kerja yang membahas rancangan Deklarasi Khartoum dan Joint Communiqué yang akan diputuskan di pertemuan Konferensi.

I. CONFERENCE

Pada Konferensi ini, Indonesia telah secara resmi menyerahkan Presidensi Konferensi PUIC kepada Sudan untuk satu tahun ke depan. Dalam sambutan penyerahan Presidensi tersebut, Indonesia telah melaporkan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Ketua DPR RI sebagai Presiden PUIC periode 2011-2013 dan capaiannya serta dorongan untuk memperkuat solidaritas sesama negara PUIC.

Pertemuan yang dibuka oleh Wapres Sudan, H.E. Ali Osman Mohammad

Taha, secara khusus mengucapkan apresiasi Pemerintah Sudan atas dukungan PUIC untuk menolak kriminalisasi yang dilakukan *International Criminal Court* (ICC) terhadap Presiden Sudan. Wapres Sudan juga menekankan pentingnya kerjasama antara negara-negara Islam dalam membantu negara yang terisolasi secara ekonomi akibat sanksi negara lain sebagaimana yang dialami oleh Sudan.



Foto 7. KH. Dr. Surahman Hidayat pada Conference PUIC

Konferensi juga telah mengikuti laporan ke-empat Standing Specialized Committee serta membahas draft Khartoum Declaration on Muslim Women Parliamentarians dan Joint Communique (**lampiran 5**) beserta resolusi-resolusi yang dicapai pada pertemuan ini.

Di akhir pertemuan, Indonesia sebagai Presiden PUIC terdahulu ditetapkan kembali sebagai anggota dari PUIC Executive Committee. Selain itu, berdasarkan kesepakatan di Grup Asia, Indonesia menjadi anggota pula pada *Standing Specialized Committee on Political and Foreign Relations* dan *Standing Specialized Committee on Economic Affairs and Environment*.

Pada hari terakhir pertemuan, Konferensi PUIC memberikan kesempatan kepada observers untuk menyampaikan pernyataannya. Kesempatan ini digunakan oleh Turkish Cypriot dan Moro National Liberation Front (MNLF) untuk meminta dukungan

bagi mereka.

Dalam pidatonya, pemimpin Moro, Nur Misuari, menyatakan kekecewaan mereka atas hasil yang dicapai dalam pertemuan Menlu di Djibouti serta pertemuan di Bandung yang menurutnya gagal dalam mencari solusi yang komprehensif bagi implementasi perjanjian damai 1996. Nur Misuari juga menegaskan bahwa Bangsa Moro siap meninggalkan perjanjian damai dan melakukan cara apapun untuk mencapai tujuan mereka (**lampiran 6**).

V. CATATAN DAN REKOMENDASI

1. Terkait tindak lanjut konsep usulan Parlemen Islam, DPR RI perlu membahas secara lebih mendalam tanggapan Indonesia atas ide tersebut. Dari pembahasan dalam Executive Committee, terlihat jelas bahwa sebagian besar negara anggota tidak mencermati secara khusus permasalahan yang mungkin muncul dari pelaksanaan usulan ini, khususnya karena lemahnya modalitas proses transformasi tersebut. Tanggapan ini kiranya dapat diselesaikan sebelum pertemuan pakar satu bulan mendatang di Sudan.
2. Peran penting anggota perempuan DPR RI di PUIC telah disadari, terutama dengan inisiasi penyelenggaraan *the First Conference of Muslim Women Parliamentarians* di Palembang tahun 2012. Oleh karena itu, ke depannya perlu ditingkatkan terus peran yang dimainkan oleh anggota DPR RI perempuan untuk dapat menggerakkan dan memotivasi pemberdayaan anggota parlemen perempuan Muslim di negara-negara Islam.
3. Terkait dengan pidato MNLF pada PUIC Conference, agar DPR RI mencermati keinginan faksi MNLF untuk meninggalkan perjanjian damai tahun 1996. Hal ini merupakan reaksi dari “hilangnya” peran kelompok ini dalam mekanisme kesepakatan yang dilakukan oleh Pemerintah Filipina yang jika tidak tertangani secara baik dapat menimbulkan konflik di Filipina Selatan di mana Indonesia telah berperan aktif dalam upaya meredakannya.

4. Keberhasilan Indonesia dalam memasukkan perlindungan tenaga kerja dalam agenda dan resolusi PUIC merupakan hal positif yang perlu terus ditingkatkan di masa mendatang, khususnya dalam rangka menggerakkan negara-negara penerima tenaga kerja dalam melindungi tenaga kerja negara pengirim di negaranya.
5. Rencana anggota Executive Committee dan anggota Conference on the Muslim Women Parliamentarians ke Gaza perlu mendapat dukungan positif, meskipun pada pelaksanaannya dipastikan akan memperoleh kesulitan dari Israel. Momentum meningkatnya status Palestina sebagai negara di PBB perlu terus dikuatkan sehingga mencapai hasil yang maksimal.
6. The 9th Session of PUIC Conference akan diselenggarakan di Burkina Faso pada tahun 2014.

Jakarta, Januari 2013

Ketua Delegasi,

KH. Dr. Surahman Hidayat, MA.

Ketua BKSAP/ F-PKS

LAMPIRAN 1

LAMPIRAN 2

LAMPIRAN 3

LAMPIRAN 4

LAMPIRAN 5

LAMPIRAN 6

